

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2024



2024

**BKIPM
BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (LKj) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian target Tahun 2024.



Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode Triwulan II tahun 2024 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai KIPM Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan II tahun 2024.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.



Balikpapan, 03 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	8
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
1.3 STRATEGI ORGANISASI.....	11
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 VISI DAN MISI.....	13
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	14
2.3 PENGUKURAN KINERJA.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA	17
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI.....	19
3.3 REALISASI ANGGARAN	42
3.4 EFISIENSI ANGGARAN	43
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN.....	45
4.2 REKOMENDASI	45
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024.....	7
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan II Tahun 2024	15
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan II Tahun 2024	19
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2024	20
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2024	27
Tabel 6. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	29
Tabel 7. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	30
Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.....	32
Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2024	42
Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BKIPM Balikpapan	10
Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2024	14
Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU Pada Sistem Aplikasi Kinerjaaku Tahun 2024.....	17
Gambar 4. Kegiatan Inspeksi / Verifikasi Tahunan CPIB di Suplier	21
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi <i>Traceability</i> di Unit Pengolahan Ikan	23
Gambar 6. Kegiatan Inspeksi / Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP di UPI	25
Gambar 7. Kegiatan Surveilen Konsistensi Penerapan HACCP di UPI.....	26
Gambar 8. Tangkap Layar Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Website https://ptsp.kkp.go.id/skm/	28
Gambar 9. Tangkap Layar Indeks Profesionalitas ASN Pada Website http://ropeg.kkp.go.id/	35
Gambar 10. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan II Tahun 2024	38
Gambar 11. Tangkap Layar Nilai IKPA BKIPM Balikpapan Pada Website https://spanint.kemenkeu.go.id/	40
Gambar 12. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Pada Website https://spanint.kemenkeu.go.id/	43

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 Balai KIPM Balikpapan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan tahun 2020-2024.

Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 115.57 % dengan kategori istimewa, dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 capaian ini mengalami kenaikan. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian sasaran kegiatan dan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan II tahun 2024 sudah tercapai dengan sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024, terdapat 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan yang belum ada realisasi pada Triwulan II, karena target pencapaian dilakukan per tahunan.

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan
2. Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan
3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan
5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan lingkup BKIPM Balikpapan
6. Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			
			Target Tahunan	Target TW. II	Realisasi TW. II	%
SK 1.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, secara profesional dan partisipatif						
IK 1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	10	1	10	120
IK 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	3	1	1	100
IK 3	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	15	8	11	120
IK 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	9	7	12	120
SK 2.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan, secara profesional dan partisipatif						
IK 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	84	84	99.94	118,98
IK 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	1	-	-	-
SK 3.1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
IK 7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	81	87.94	108.57
IK 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	82	-	-	-
IK 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	100	-	-	-
IK 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	80	80	100	120
IK 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	93,76	83	92.67	111.65
IK 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	-	-	-

IK 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	80	-	-	-
IK 14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	80	-	-	-

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Lingkup BKIPM Balikpapan

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

Capaian Kinerja keuangan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 3.097.061,046,- atau sebesar 48,27 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.416.500.000,-. Anggaran Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 436.500.000,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan II tahun 2024, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 115.57 %, dimana kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai KIPM Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Balikpapan sejumlah 19 pegawai, 9 orang PPNP dan 3 orang *outsourcing*. ASN di BKIPM Balikpapan terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 9 pegawai fungsional inspektur mutu, 2 pegawai fungsional arsiparis, 3 pegawai fungsional keuangan dan 1 pegawai fungsional BMN. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (*traceability*) produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem *traceability*, dan melakukan surveilen pada UPI terhadap konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHQP

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 adalah mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

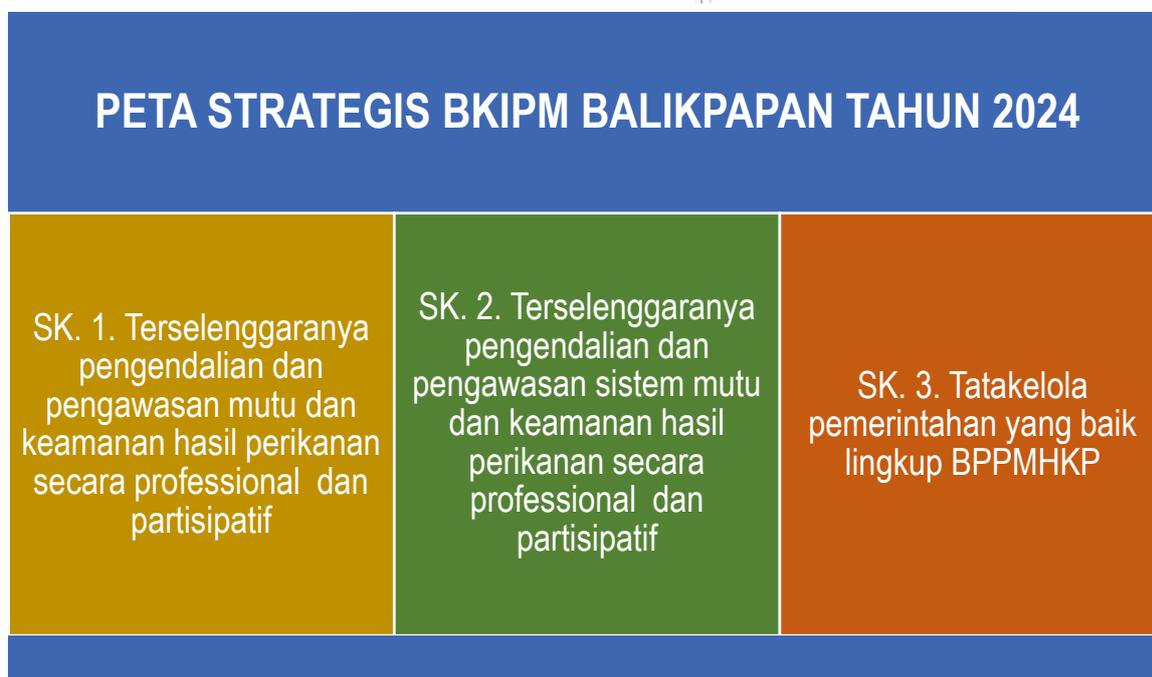
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2. dan Tabel 2. dibawah ini.



Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan II
IKK. 1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	10	1
IKK. 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem <i>Traceability</i> lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	3	1
IKK. 3	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	15	8
IKK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	9	7
IKK. 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	Nilai	84	84
IKK. 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	1	-
IKK. 7	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	86	81
IKK. 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	82	-
IKK. 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	-
IKK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	80
IKK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	93,76	83
IKK. 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	-
IKK. 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	-
IKK. 14	Tingkat kepatuhan pengadaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	-

**Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan II
Tahun 2024**

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

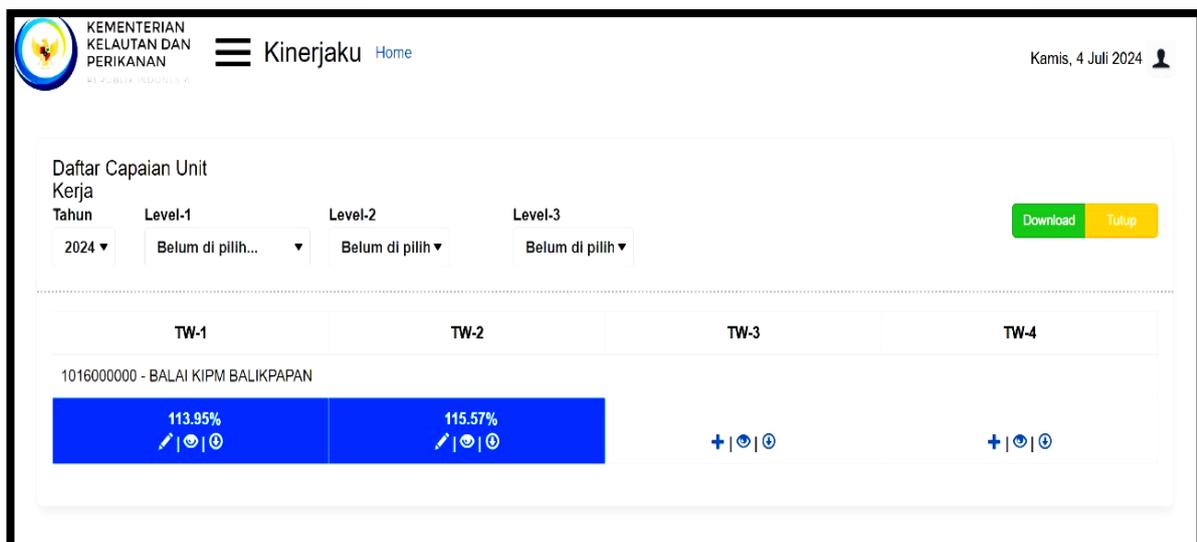
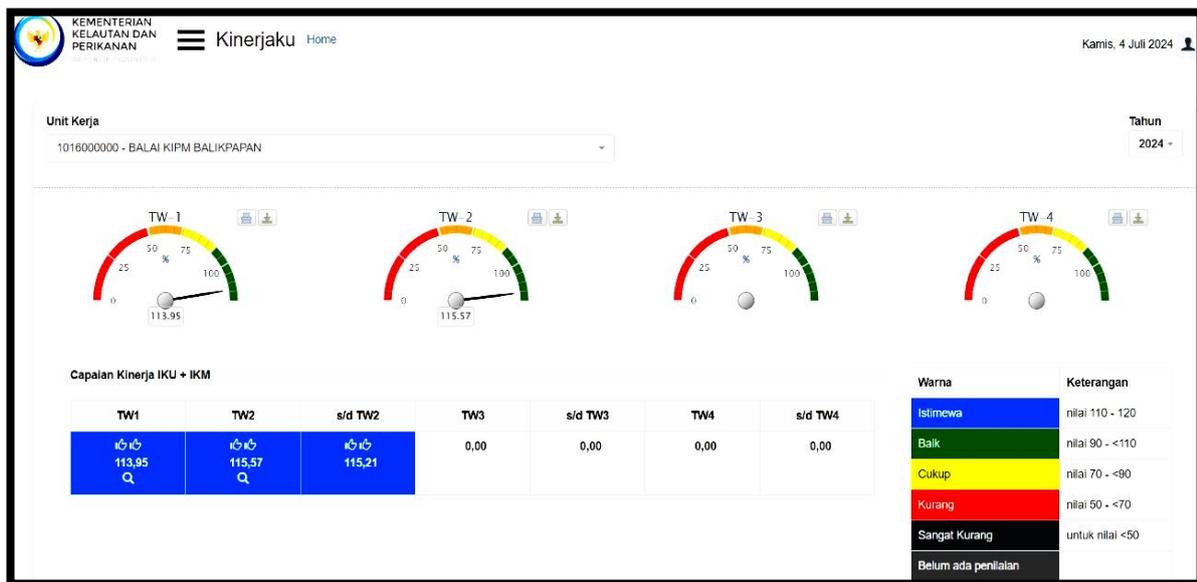
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	90 - < 110	70 - < 90	50 - < 70	< 50
Istimewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan II tahun 2024 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 115.57 % dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di <https://kinerjaku.kkp.go.id>



Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai KIPM Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 sebesar 115,57 %,

capaian ini lebih tinggi dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 112,11 %.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan II tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
			Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif					
IKK. 1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	1	10	120
IKK. 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	1	1	100
IKK. 3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	8	11	120
IKK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	7	12	120
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif					
IKK. 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	Nilai	84	99,94	118,98
IKK. 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	-	-	-
SK 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BPPMHKP					
IKK. 7	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	81	87.94	108.57
IKK. 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	%	-	-	-
IKK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	100	120

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
			Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%
IKK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	83	92.67	111.65
IKK. 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	%	-	-	-
IKK. 14	Tingkat kepatuhan pengadaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	%	-	-	-

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan II Tahun 2024

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail berdasarkan indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikpapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai capaian kegiatan Balai KIPM Balikpapan untuk sasaran kegiatan 1 pada Triwulan II tahun 2024 tersebut adalah 115,00 %.

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan.
2. Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability*.
3. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk

pada UPI.

4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024			Renstra 2020 - 2024	
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	(%)	Target	(%)
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif							
IKK. 1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	6	1	10	120	10	60
IKK. 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan	-	1	1	100	3	33.3
IKK. 3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	8	8	11	120	15	53.3
IKK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	11	7	12	120	9	122

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 1. Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit suplier) perlu dilakukan sertifikasi. Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit suplier sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Untuk memastikan bahwa suatu unit suplier menerapkan Program Persyaratan Dasar serta menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan konsepsi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi

maupun verifikasi tahunan penerapan CPIB terhadap supplier.

Supplier merupakan salah satu rantai proses hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi sebagai pengumpul / pemasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI). Penanganan bahan baku hasil perikanan pada unit supplier merupakan salah satu bagian penting dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan, UPI tidak akan dapat menghasilkan produk akhir yang bermutu dan aman jika bahan baku dari supplier tidak sesuai persyaratan mutu dan keamanan.

Pada unit supplier yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sanitasi / *hygiene*, sistem rantai dingin (*cold chain system*) didukung oleh sarana prasarana yang memadai, memiliki personil yang kompeten serta menerapkan HACCP dalam proses produksi dapat diterbitkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Penerapan CPIB di unit supplier akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan berdampak pada nilai tambah dalam perdagangan hasil perikanan.



Gambar 4. Kegiatan Inspeksi / Verifikasi Tahunan CPIB di Supplier

Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan perhitungannya berdasarkan jumlah supplier yang tersertifikasi CPIB. Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 adalah sebanyak 10 laporan atau 120 % dari target sebanyak 1 laporan. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan II tahun 2023 yaitu 6 laporan.

IKK. 2. Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem *Traceability*

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara :

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- d) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketertelusuran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir.

Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk pengendalian Mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar apabila terjadi penolakan produk perikanan dari negara tujuan dapat dilakukan penelusuran dengan lebih cepat dan mudah.



Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Traceability di Unit Pengolahan Ikan

Capaian indikator kinerja unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability* perhitungannya berdasarkan jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* dan mendapatkan Surat Keterangan Penerapan Sitem *Traceability*. Pada Triwulan II Tahun 2024 tidak ada kegiatan Traceability di UPI Lingkup BKIPM Balikpapan. Berdasarkan program kegiatan traceability tahun 2024, kegiatan dilakukan pada triwulan I, III dan IV. Sehingga capaian untuk triwulan II tahun 2024 sama dengan capaian triwulan I tahun 2024 sebesar 1 UPI atau 100 % dari target sebanyak 1 UPI. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan II tahun 2023 yaitu sebanyak 0 UPI.

IKK. 3. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) Ruang Lingkup Produk Pada UPI

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan oleh UPI maka BPPMHKP selaku Otoritas Kompeten menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis and Critical Control Point* yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP. Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJMKHP pada rangkaian proses produksinya. Persyaratan SJMKHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI.

Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan / atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan / atau diolah oleh UPI. Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJMKHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi.

Inspeksi penerapan PMMT / HACCP dilaksanakan melalui mekanisme inspeksi di tempat (*On Site Visit*) dan inspeksi jarak jauh (*Remote Inspection*). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJMKHP yang dilakukan oleh UPI.

Sertifikasi penerapan HACCP pada Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Tata Cara sertifikasi penerapan HACCP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis Critical Control Point* serta Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis Control Point*.

Indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah tersertifikasi HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan pada tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat HACCP melalui kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Pada periode Triwulan II tahun 2024 capaian indikator kinerja sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI adalah sebanyak 11 ruang lingkup produk dengan persentase sebesar 120 % dari target tahun 2024 sebanyak 15 ruang lingkup produk. Dibandingkan capaian Triwulan II tahun 2023 yaitu sebanyak 8 ruang lingkup produk, capaian indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI periode Triwulan II tahun 2024 mengalami peningkatan.

Ruang lingkup produk yang di jamin melalui sertifikasi HACCP periode Triwulan II tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1. PT. Borneo Ocean Naully, Grade B sebanyak 1 ruang lingkup produk
2. CV. Tiga A Unit Kampung Baru, Grade B sebanyak 3 ruang lingkup produk



Gambar 6. Kegiatan Inspeksi / Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP di UPI

IKK. 4. UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang telah tersertifikasi HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP / GMP dan penerapan HACCP dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan grade HACCP UPI.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar

Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Indikator UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diukur dengan menghitung jumlah UPI yang konsisten dalam penerapan HACCP dan dibuktikan pada saat verifikasi penilaian konsistensi penerapan HACCP (surveilen). Realisasi indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada periode II tahun 2024 mencapai 12 UPI dengan prosentase 120 % dari target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2024 sebanyak 7 UPI. Capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan periode Triwulan II tahun 2024 memiliki capaian yang lebih tinggi bila dibandingkan capaian Triwulan II tahun 2023 yaitu sebanyak 11 UPI.



Gambar 7. Surveilen Konsistensi Penerapan HACCP di UPI

Tercapainya realisasi UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan komitmen bersama antara Balai KIPM Balikpapan dan stakeholder dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan

program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai sasaran kegiatan Balai KIPM Balikpapan Triwulan II tahun 2024 tersebut adalah 117,92 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik;
2. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi .

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024			Renstra 2020 - 2024	
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	(%)	Target	(%)
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif							
IKK. 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	94.81	84	99,94	118.98	84	118.98
IKK. 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	2	-

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat / pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam

penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

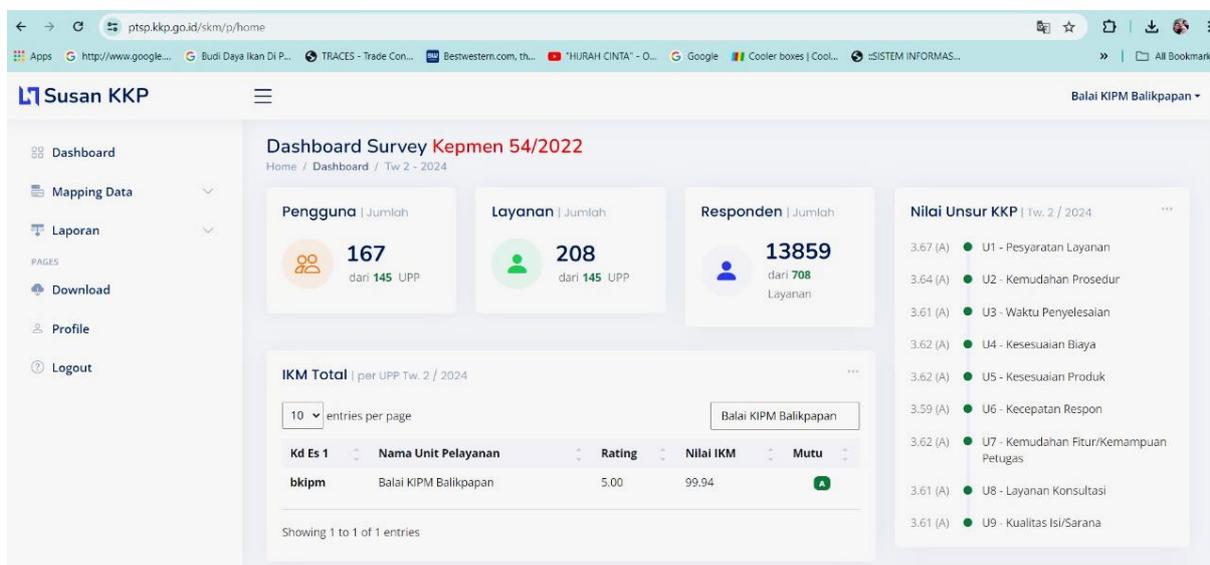
$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM	=	<u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u> Unsur Yang Terisi	X Nilai Penimbang Total
------------	----------	---	--------------------------------

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25



Gambar 8. Tangkap Layar Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Website <https://ptsp.kkp.go.id/skm>

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 6. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 99.94 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 88.31 - 100.00. Capaian Indikator Kinerja nilai kepuasan masyarakat terhadap proses layanan dari Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar 99.94 atau dengan persentase sebesar 118.98 % dari target yang ditetapkan yaitu 84. Dibandingkan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan nilai 94.81, capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan II tahun 2024 memiliki capaian yang lebih meningkat.

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4.00
2	Kemudahan prosedur pelayanan	4.00
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	4.00
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	4.00
5	Kesesuaian produk pelayanan	4.00
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh / unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3.98
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	4.00

8	Kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan	4.00
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	4.00
Rata-rata		4.00

Tabel 7. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja nilai capaian pada survei kepuasan masyarakat (SKM) antara lain :

- a. Proses pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha
- b. Sosialisasi terhadap pengguna jasa sehingga memahami proses bisnis dan standar operasional standar pada bisnis proses Balai KIPM Balikpapan,
- c. SDM / Petugas layanan yang senantiasa melayani dengan dedikasi dan etos kerja yang tinggi

Dari hasil evaluasi pelaksanaannya proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat konsisten tercapai, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- a. Komitmen terhadap janji layanan
- b. Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima untuk petugas layanan
- c. Dukungan sarana dan prasarana layanan
- d. Sosialisasi terhadap proses pengisian indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penilaian SKM dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat dalam unsur pelayanan secara umum adalah sangat baik. Namun kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan terutama unsur pelayanan yang memperoleh nilai lebih rendah, agar nilai SKM yang diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan / stakeholder.

IKK. 6. Laporan Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup BKIPM Balikpapan

BPPMHKP sebagai otoritas kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. dalam kegiatan program unggulan di bidang perikanan dan kelautan berkaitan dengan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan,

BPPMHKP berperan sebagai *Quality Assurance* (QA) yaitu penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan memenuhi standar yang diakui secara internasional.

Pada tahun 2024 BKIPM Balikpapan membuat target indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi sebanyak 1 laporan dengan perhitungan capaian indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi per tahunan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan II tahun 2024 tersebut adalah 112,72 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik adalah :

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan
2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan
6. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan
7. Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan
8. Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024			Renstra 2020 - 2024	
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	(%)	Target	(%)
SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BPPMHKP							
IKK. 7	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	87.94	81	87.94	-	86	102.25
IKK. 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	85	-
IKK. 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	≤ 0.5	-
IKK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	100	80	100	120	100	100
IKK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	92.67	83	92.67	-	93.76	98.84
IKK. 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	86	-
IKK. 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	77.5	-
IKK. 14	Tingkat kepatuhan pengadaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	77.5	-

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 7. Indeks Profesional ASN Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi : a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua) c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda) e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat f. Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III / SM	10
1	Pendidikan D II / SMA	5
0	Pendidikan SMP / SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat fungsional / Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan seminar / workshop / konferensi / setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah ikut seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total		40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), b. Perilaku Kerja dengan formula sebagai berikut :

No.	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 – 90	25
3	Cukup	61 – 75	15
4	Kurang	51 – 60	5
5	Buruk	50 – ke bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :
 - a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✚ Perhitungan nilai Diklat PIM, Diklat Fungsional / Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - ✚ Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

The screenshot shows a web browser displaying the 'IP ASN 2024' dashboard. A search bar contains 'BALAI KIPM BALIKPAPAN'. Below it is a table with the following data:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI KIPM BALIKPAPAN	18	20.72	82.88 %	32.78	81.95 %	29.44	98.13 %	5	100 %	87.94	TINGGI

Gambar 9. Tangkap Layar Indeks Profesionalitas ASN Pada Website ropeg.kkp.go.id

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar 87.94 atau dengan persentase sebesar 108.57 % dari target yang ditetapkan yaitu 81. Dibandingkan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan nilai 80.61, capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan II tahun 2024 memiliki capaian yang lebih meningkat.

IKK. 8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BKIPM Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dilakukan secara tahunan

IKK. 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BKIPM Balikpapan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate*

disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

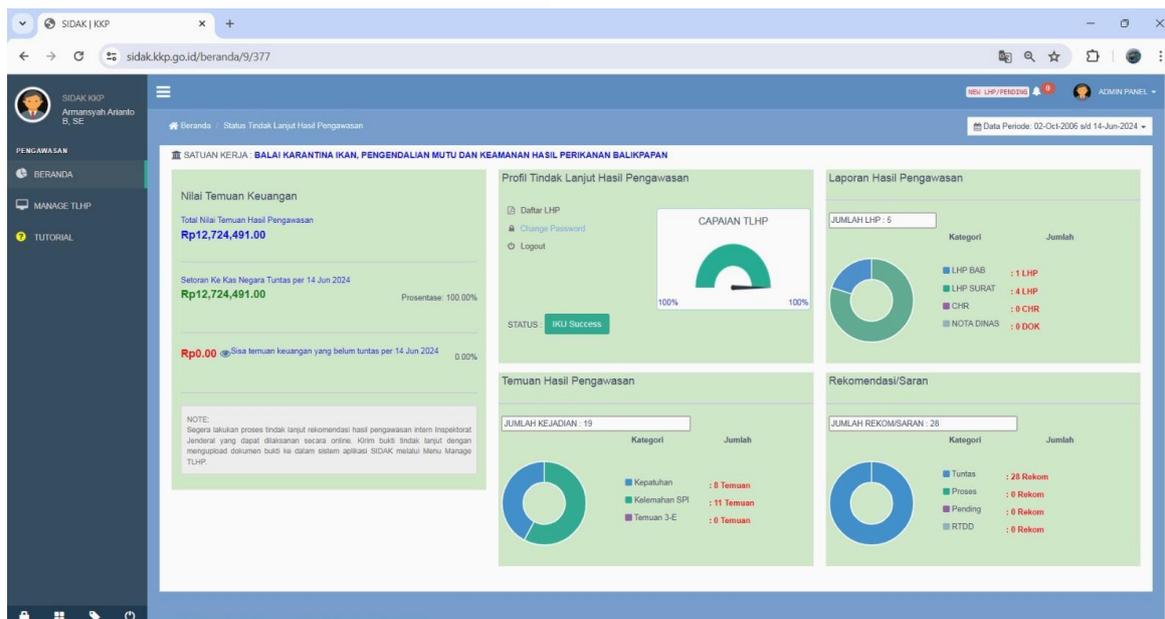
SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan : Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

IKK. 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai KIPM Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan / atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 80 % pada tahun 2024. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II V 2023 sampai dengan Triwulan II II 2024 dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas).

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan II tahun 2024 adalah 100 % dari target sebesar 80 %, yang diperoleh dari hasil tindaklanjut atas laporan hasil pengawasan (LHP) Itjen KKP melalui aplikasi SIDAK KKP yang diterbitkan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.



Gambar 10. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan II Tahun 2024

IKK. 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator capaian output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi capaian output menjadi capaian output. Perhitungan capaian output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut : Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja

keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
3. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin.
4. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
6. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
9. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
10. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.
11. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
12. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
13. Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	83.27	93.62	0.00	0.00	100.00	91.68	74.14	80%	0.00	92.67	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.49	18.72	0.00	0.00	10.00	22.92					
					Nilai Aspek		91.64			96.81		91.68					

Gambar 11. Tangkap Layar Nilai IKPA BKIPM Balikpapan Pada Website spanint.kemenkeu.go.id

Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan II tahun 2024 adalah 92.67 % dari target sebesar 83 %, yang dapat dilihat melalui website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Capaian ini lebih tinggi daripada capaian Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2023 sebesar 89.23 %.

IKK. 12. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKIPM Balikpapan

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek

manfaat dengan bobot masing-masing.

Target yang ditetapkan untuk nilai kinerja anggaran tahun 2024 adalah Baik (86) sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan tahunan pada aplikasi Online Monitoring SMART DJA.

IKK. 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup BKIPM Balikpapan

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa lingkup BKIPM Balikpapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang / jasa strategis (10 %)
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan (15 %)
3. Persentase pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
4. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang / jasa (5 %)
5. Kesesuaian tahapan pelaksanaan (45 %)
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang / jasa lingkup Eselon I Triwulan II sampai dengan Triwulan II II Tahun 2023 (15 %)

Pengukuran capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa dilaksanakan per tahun.

IKK. 14. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BKIPM Balikpapan

Kegiatan pengelolaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12.5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST hingga Triwulan II II Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan II II Tahun 2024 (bobot 25 %)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara

Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)

5. Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12.5 %)

Indikator Kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2024 pengukurannya dilaksanakan secara tahunan.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Balikpapan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 6.416.500.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 436.500.000,- sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp. 5.980.000.000,-. Penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah Rp. 2.947.526.688,- atau sebesar 45.94% dari pagu anggaran yang tersedia.

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,57 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Triwulan II tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 8. dan Tabel 9 dan Gambar 12. .

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3.322.202.000	1.974.186.206	59.42
2	Belanja Barang	3.094.298.000	973.340.482	31.46
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	6.416.500.000	2.947.526.688	45.94

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengendalian Mutu	210.850.000	56.539.361	26.81
2	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	436.500.000	0	0
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	5.769.150.000	2.890.987.327	50.11
	Total	6.416.500.000	2.947.526.688	45.94

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA								TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN		TRANSFER
1	567610 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	PAGU	3,322,202,000	3,094,298,000	0	0	0	0	0	0	0	6,416,500,000
		REALISASI	1,974,186,206 (59.42%)	973,340,482 (31.46%)	0 (0.00%)	2,947,526,688 (45.94%)						
		SISA	1,348,015,794	2,120,957,518	0	0	0	0	0	0	0	3,468,973,312
GRAND TOTAL		PAGU	3,322,202,000	3,094,298,000	0	0	0	0	0	0	0	6,416,500,000
		REALISASI	1,974,186,206 (59.42%)	973,340,482 (31.46%)	0 (0.00%)	2,947,526,688 (45.94%)						
		SISA	1,348,015,794	2,120,957,518	0	0	0	0	0	0	0	3,468,973,312

Gambar 12. Tangkap Layar Realisasi Anggaran BKIPM Balikpapan Sampai Dengan Triwulan II 2024 Pada Website spanint.kemenkeu.go.id

3.4. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan

anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Balai KIPM Balikpapan untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan II tahun 2024, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA BKIPM Balikpapan Tahun 2024.
2. Delapan (8) kegiatan yang merupakan target pada triwulan II memiliki capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan OMSPAN adalah Rp. 2.947.526.688,- atau sebesar 45.94 % dari pagu anggaran Rp. 6.416.500.000,-.

BAB. IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Balikpapan Triwulan II tahun 2024 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2020- 2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan II tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Nilai capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 115,57 % yang dapat dilihat pada aplikasi kinerja di <https://kinerjaku.kkp.go.id/>
2. Pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan II tahun 2024 sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,57 % pada aplikasi kinerja.
3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II tahun 2024, sebanyak 8 indikator kinerja capaiannya telah memenuhi / melebihi target.
4. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan II tahun 2024 mencapai Rp. 2.947.526.688,- atau sebesar 45.94 % dari pagu anggaran Rp. 6.416.500.000,-.
5. Untuk meningkatkan nilai efisiensi pada triwulan berikutnya maka Balai KIPM Balikpapan perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi sumberdaya dengan memaksimalkan sumberdaya manusia, waktu kerja dan anggaran kegiatan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan II tahun 2024 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan berikutnya. Pelaksanaan

kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;

2. Melakukan perbaikan / tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.

LAMPIRAN

**JUMLAH SERTIFIKAT CPIB YANG DITERBITKAN
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN
PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK. 1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan (Laporan)	2	10

Uraian Capaian IKK
Jumlah Laporan Kegiatan Inspeksi / Verifikasi Tahunan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di supplier yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II 2024 berjumlah 10 Laporan

Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Substanto, S.Pi, M.Si

LAPORAN SERTIFIKASI CPIB SUPLIER

UPT KIPM : Balai KIPM Balikpapan

TRIWULAN : II Tahun 2024

No.	Nama Suplier	Jenis Olahan (Segar, Beku, Olahan)	Alamat	Produk	Klasifikasi (Sangat Baik/ Baik/Cukup)	No. Sertifikat CPIB	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan	UPI Yang Di Suplai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia	Olahan	Jl. 21 Januari Gang Batu Arang No. 15 RT. 53, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur - Indonesia	Daging Rajungan Rebus Dingin	Cukup	011/CPIB/6/IV/2023	14 April 2023	14 April 2027	PT. Nirwana Segara	Verifikasi Tahunan I
2	Andi Murzidik Z	Segar	Jl. 21 Januari RT. 08 No. 47, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur - Indonesia	Ikan Demersal	Cukup	009/CPIB/6/IV/2023	06 April 2023	06 April 2027	CV. Tiga A	Verifikasi Tahunan I
3	Yennie	Segar	Jl. Letjen Suprpto, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur - Indonesia	Ikan Demersal	Cukup	010/CPIB/6/IV/2023	06 April 2023	06 April 2027	CV. Tiga A	Verifikasi Tahunan I
4	UD. Amin Jaya	Segar	Jl. 21 Januari No. 98-99 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prop Kalimantan Timur	Ikan Demersal	Cukup	012/CPIB/6/IV/2023	11 Mei 2023	11 Mei 2027	CV. Tiga A	Verifikasi Tahunan I
				Ikan Pelagik	Cukup	013/CPIB/6/IV/2023	11 Mei 2023	11 Mei 2027	CV. Tiga A	Verifikasi Tahunan I

5	PT. Alvindo Mitra Mandiri	Segar	Jl. Marsma R. Iswayudi RT. 002, Kel. Sungainangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	Udang	Baik	015/CPIB/6/VI/2023	23 Juni 2023	23 Juni 2027	PT. Sumber Kalimantan Abadi	Verifikasi Tahunan I
		Beku		Udang	Baik	016/CPIB/6/VI/2023	23 Juni 2023	23 Juni 2027	PT. Sumber Kalimantan Abadi	Verifikasi Tahunan I



**UNIT PENANGANAN DAN / ATAU PENGOLAHAN IKAN YANG MENERAPKAN SISTEM
TRACEABILITY LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN
PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK.2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan (Laporan)	1	1

Uraian Capaian IKK
Jumlah Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM sampai akhir Triwulan II 2024 berjumlah 1 UPI



Balikpapan, 02 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

**UNIT PENANGANAN DAN / ATAU PENGOLAHAN IKAN YANG MENERAPKAN SISTEM TRACEABILITY
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Triwulan : Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk	Tanggal Inspeksi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Borneo Ocean Naulu	Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	B	Dried Sewaeed	20 Februari 2024	2024 - 2026



Balikpapan, 02 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

**SERTIFIKASI HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) RUANG LINGKUP
PRODUK PADA UPI LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN

PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK. 3	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan (Produk)	8	11

Uraian Capaian IKK
Jumlah ruang lingkup produk di UPI yang telah tersertifikasi HACCP atau telah dilakukan monitoring evaluasi penerapan HACCP sampai akhir Triwulan II 2024 berjumlah 11 Laporan

Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto,

SERTIFIKASI HACCP RUANG LINGKUP PRODUK PADA UPI
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan II / 2024

No.	Nama UPI	Alamat	Peringkat/ Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Jumlah	Nomor Sertifikat HACCP	Tanggal Inspeksi / Monev HACCP	Masa Berlaku Sertifikat HACCP	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Borneo Ocean Naully	Jl. Tanjung Harapan, Kel. Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara	B	Dried Seaweed	1	143/PM/HACCP/PK/03/2023	04 April 2024	15 Maret 2023 - 15 Maret 2025	Monev HACCP
2	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jl. 21 Januari Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp	3	052/PM/HACCP/PS/07/23	27 Juni 2024	14 Juli 2023 - 14 Juli 2025	Monev HACCP

Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan,



Eko Sulistyanto

UPI YANG KONSISTEN MENERAPKAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN
PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan (UPI)	7	12

Uraian Capaian IKK
Jumlah UPI yang konsisten dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sampai akhir Triwulan II 2024 berjumlah 12 Laporan



Balikpapan, 02 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

**SURVEILEN KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Triwulan : Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk	Tanggal Surveilen	Nomor Surat Keterangan Hasil Surveilen
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Sumber Kalimantan Abadi	Jl. Mulawarman No. 99, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	A	Frozen Raw Shrimp Frozen Cooked Shrimp	17 Januari 2024	1/06.0/SKV/02/24
2	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp Fresh Swimming Crab	22 Januari 2024	2/06.0/SKV/02/24
3	PT. Syam Surya Mandiri	Jl. Propinsi No. 01, Kampung Kajang, Kel. Sungai Meriam, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara	A	Frozen Raw Shrimp Frozen Cooked Shrimp	23 Januari 2024	3/06.0/SKV/02/24
4	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jl. 21 Januari Kampung Baru, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp	23 Januari 2024	4/06.0/SKV/02/24
5	CV. Multi Sarana Jaya	Jl. Emboen Suryana, Kel. Sambutan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	B	Dried Sewaeed	25 Januari 2024	5/06.0/SKV/02/24
6	PT. Borneo Ocean Naully	Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	B	Dried Sewaeed	25 Januari 2024	6/06.0/SKV/02/24

No.	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk	Tanggal Surveilen	Nomor Surat Keterangan Hasil Surveilen
1	2	3	4	5	6	7
7	PT. Ocean Paradise Fishery	Jl. Poros Limunjan Gg. Sulawesi Rt. 019 Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau	B	Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp	30 Januari 2024	7/06.0/SKV/03/24
8	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp	13 Mei 2024	8/06.0/SKV/06/24
9	PT. Ocean Paradise Fishery	Jl. Poros Limunjan Gg. Sulawesi Rt. 019 Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau	B	Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp	14 Mei 2024	9/06.0/SKV/06/24
10	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jl. 21 Januari Kampung Baru, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp	15 Mei 2024	10/06.0/SKV/06/24
11	PT. Borneo Ocean Naully	Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	B	Dried Sewaeed	20 Mei 2024	11/06.0/SKV/06/24
12	CV. Multi Sarana Jaya	Jl. Emboen Suryana, Kel. Sambutan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	B	Dried Sewaeed	21 Mei 2024	12/06.0/SKV/06/24



Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

**NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN
PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK. 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	84	99,94

Uraian Capaian IKK
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan II Tahun 2024 memperoleh nilai 99,94 dengan kategori Sangat Baik



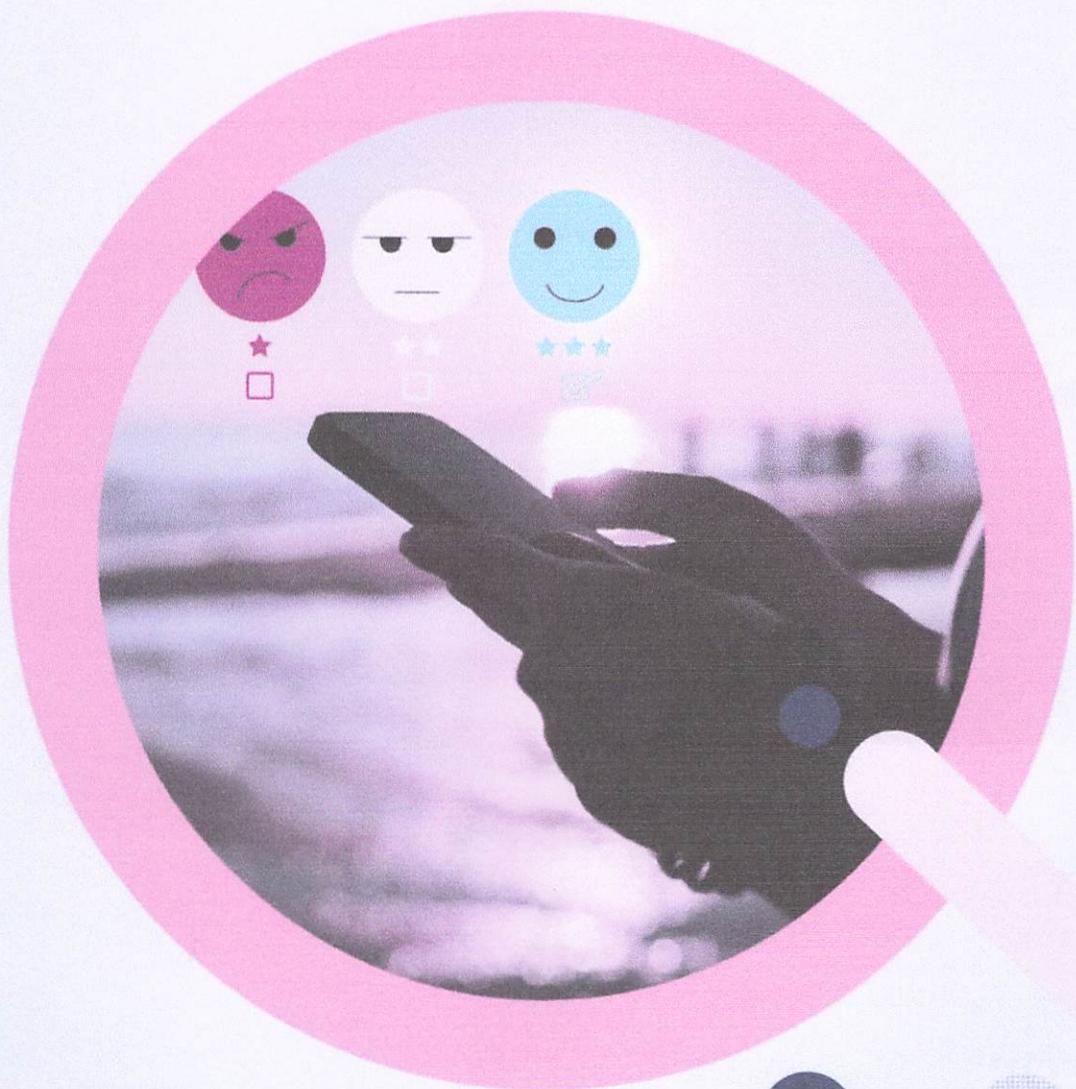
Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto, S.Pi,



LAPORAN

MONITORING EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**



**LAPORAN MONITORING EVALUASI
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BALAI KIPM BALIKPAPAN
TRIWULAN II**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Pada Triwulan II Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan dan pengambilan kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di masa yang akan datang, khususnya dilingkup Balai KIPM Balikpapan.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Triwulan II Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Balikpapan.

Balikpapan, 01 Juli 2024

Kepala,



Eke Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP. 197002111997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM	
2.1. Pelaksana SKM.....	6
2.2. Metode Pengumpulan Data	6
2.3. Lokasi Pengumpulan Data.....	7
2.4. Waktu Pelaksanaan SKM	8
2.5. Penentuan Jumlah Responden.....	8
BAB III. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	
3.1. Jumlah Responden SKM	10
3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	11
BAB IV. ANALISA HASIL SKM	
4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	13
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	14
4.3. Tren Nilai SKM	15
BAB V. Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	16
BAB VI. KESIMPULAN	18
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana pelayanan, serta konsultasi pengaduan.

Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu Unit Penyelenggara Pelayanan lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih bersifat kepada pelayanan masyarakat atau publik. Pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat yang melalulintaskan produk perikanan baik yang dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai KIPM Balikpapan harus senantiasa menerapkan ketentuan-ketentuan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Pelayanan tersebut diberikan dalam rangka memenuhi persyaratan pengiriman komoditi perikanan di daerah atau negara tujuan untuk memverifikasi persyaratan karantina dan pengendalian mutu bagi pemasukan komoditi perikanan ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan mutu pelayanan bahwa Balai KIPM Balikpapan berkomitmen terhadap pemenuhan persyaratan pengguna jasa yang merupakan pelanggan dalam melalulintaskan komoditi perikanan telah ditempuh berbagai upaya antara lain :

- a. Melakukan pelayanan secara transparan sehingga akan dijamin kepastian lamanya waktu pelayanan dan besarnya biaya yang harus dibayar oleh pelanggan.
- b. Melakukan peningkatan kemampuan SDM dan sarana pelayanan sehingga dapat mempercepat pelayanan. Akan tetapi jaminan bahwa ikan yang dilalulintaskan tersebut bebas hama penyakit ikan, terjamin mutunya serta memenuhi persyaratan negara atau daerah tujuan tetap menjadi tujuan utama.

Terhadap upaya-upaya tersebut perlu di analisis dan dievaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan yang menjadi mitra kerja.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. PerMen KP No. 15/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Kepmen KP No. 54/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/pelanggan/pengguna jasa Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan.

II. PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Balai KIPM Balikpapan dilaksanakan dengan membentuk tim pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 ditunjuk oleh Kepala Balai KIPM Balikpapan (terlampir).

2.2. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Monitoring Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan Survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan dari Balai KIPM Balikpapan. Bentuk kuesioner beserta laporan hasil kuesioner berbentuk aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22> dengan daftar isian tetap mengacu pada Permen PAN RB No. 14 Tahun 2017.

2. Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

Bagian I :

- Data Layanan yang meliputi beberapa pilihan jasa layanan seperti , Penjaminan Penerapan HACCP, Ekspor, dan Jasa Pengujian Laboratorium.
- Data responden meliputi Waktu Survey, Nama, Jenis Usaha, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan, bertujuan untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan instansi pemerintah.

Bagian II :

- Berisi sembilan pertanyaan yang memuat unsur-unsur pelayanan yang akan dinilai sebagai bentuk penyampaian pendapat penerima layanan dan kesimpulan sebagai bentuk pendapat responden terhadap sikap petugas dalam memberikan layanan serta penyampaian kritik dan saran.

3. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik/tidak sesuai/tidak mudah/lambat diberi nilai persepsi 1, kurang baik/kurang sesuai/kurang mudah/kurang cepat diberi nilai persepsi 2, baik/sesuai/mudah/cepat diberi nilai persepsi 3, sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/sangat cepat diberi nilai persepsi 4. Contoh penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila:

- a) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- b) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- c) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- d) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara offline dan online dengan mengisi link kuesioner berikut <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22>. Kuisisioner tersebut di isi sendiri oleh responden/pengguna jasa Balai KIPM Balikpapan baik yang sedang berada di ruang pelayanan Balai KIPM Balikpapan pada waktu jam layanan sedang berlangsung dengan menggunakan anjungan komputer yang tersedia di ruang pelayanan, secara tatap muka pada saat kegiatan Monitoring dan Surveillance CPIB di lokasi

pengguna jasa berada, maupun dengan mengirimkan link kuesioner kepada pengguna jasa pada saat responden berada di tempat/lokasi kerja/rumah. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei kepuasan masyarakat bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan monitoring evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu per triwulan (3 bulan sekali). Survei kepuasan masyarakat triwulan II dilaksanakan dari awal bulan April hingga akhir bulan Juni 2024.

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai KIPM Balikpapan berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan periode II tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Balai KIPM Balikpapan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan adalah 43 responden.

Kriteria untuk responden Survey Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Balai KIPM Balikpapan. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling lama tiga bulan terakhir) mendapat pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Balai KIPM Balikpapan

Responden dalam kegiatan ini adalah pelanggan/ pengguna layanan berupa unit pengolahan ikan (UPI) dan supplier yang melakukan kegiatan lalulintas hasil perikanan. Sampel ditentukan berdasarkan Formula Krejcie and Morgan yaitu:

$$S = X^2 NP (1-P) / d^2(N-1) + X^2 P (1-P)$$

Dimana:

X²= Nilai chi square tabel = 3,841 dimana df=1 dan α=5%=0.05

P= Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P=0.5)

N= Jumlah Populasi

d= Tingkat toleransi kesalahan (0.05)

Tabel 1. Formula Krejcie and Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

Dari tabel diatas dan melihat jumlah populasi/pengguna jasa layanan Balai KIPM Balikpapan per 3 (tiga) bulan terakhir, maka dapat ditarik n bila dengan populasi 40 yaitu 43 sampel responden dan sudah lebih memenuhi ketentuan jumlah sampel, yang kebetulan angkanya melebihi ketentuan Formula Krejcie and Morgan penentuan jumlah sampel responden.

III. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data per Juni 2024, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 43 responden yang terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Rincian data responden sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Data Responden

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki laki	33	76,74%
		Perempuan	10	23,26%
2	Usia	≤ 25		
		25-45	43	100%
		46-60		
		≥ 60		
3	Pendidikan	SD		
		SMA	42	97,67%
		D3	1	2,23%
		S1		
		S2		
		S3		
4	Pekerjaan	PNS		
		TNI		
		POLRI		
		Swasta	41	95,35%
		Wirausaha	1	2,33%
5	Jenis Layanan	P.UKKP	1	2,33%
		Penerbitan SKLL		
		Jasa Pengujian		
		Penjaminan IKI	1	2,33%
		Penjaminan Ekspor	42	97,67%
		Penjaminan Domas		
	Penjaminan Dokel			

		Penjaminan HACCP		
--	--	---------------------	--	--

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tingkat kepuasan layanan tersebut dalam bentuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dikonversikan dan nilai tersebut disesuaikan dengan urutan kategori kinerja mutu pelayanan yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

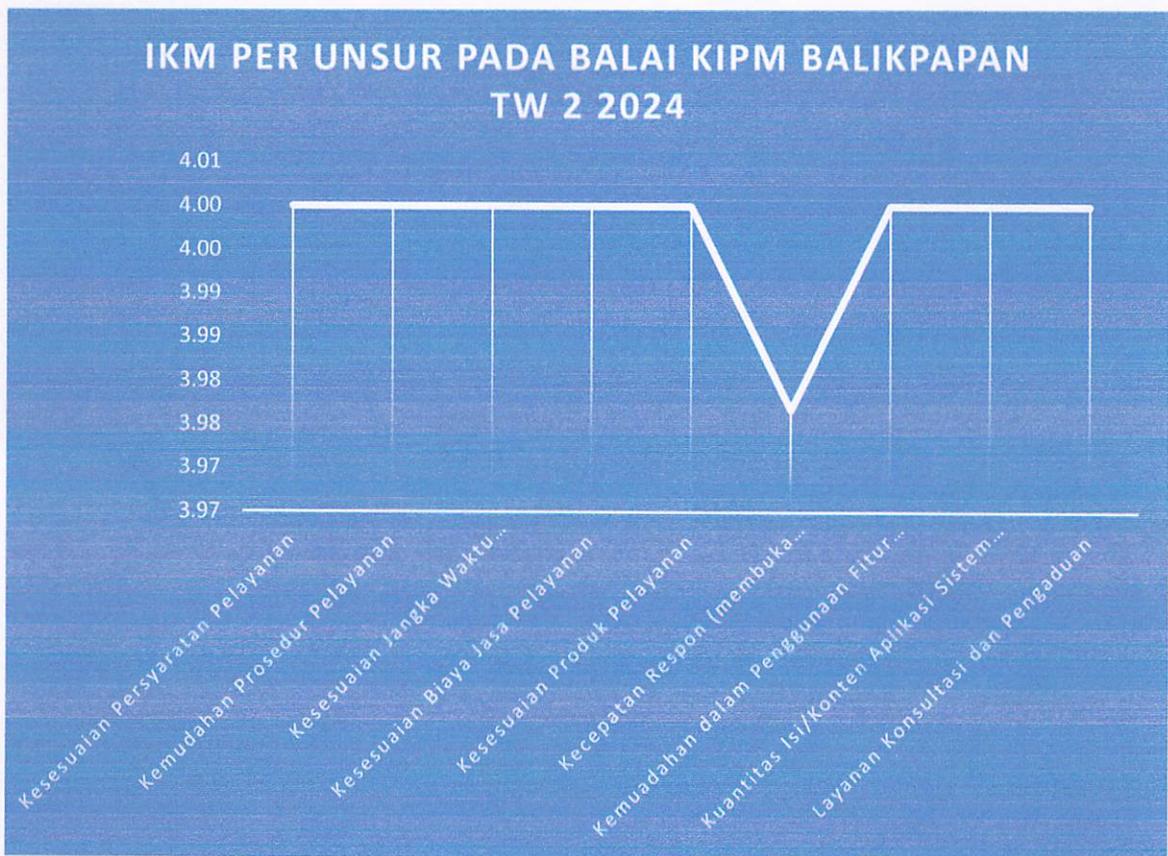
Pengolahan data SKM menggunakan PivotTabel dalam file excel dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Rerata nilai per unsur

No.	Unsur SKM	Nilai Rata2
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4,00
2	Kemudahan prosedur pelayanan	4,00
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	4,00
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	4,00
5	Kesesuaian produk pelayanan	4,00
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3,98
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	4,00

8	Kualitas isi/konten aplikasi sistem layanan	4,00
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	4,00
Rata – rata		4,00

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil skor **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 99.94** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 88.31 – 100.00.



IV. ANALISA HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata 4,00 atau lebih merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa unsur dengan Nilai (NRR) terendah adalah kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan (rata-rata 3,98). Balai KIPM Balikpapan merupakan unit pelayanan yang berpedoman pada beberapa prosedur pelayanan dan menerapkan persyaratan kepada masyarakat yang menerima jasa layanan. Nilai SKM dari semua unsur **99.94** yang menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan secara umum adalah sangat baik. Namun kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan agar nilai yang telah diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi atau sangat memuaskan bagi pelanggan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah yaitu kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan sehingga Balai KIPM Balikpapan pada unit pelayanan publik berusaha untuk lebih memenuhi janji layanan terutama dalam penginformasian ke publik mengenai kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan yang diterapkan di Balai KIPM Balikpapan. Sedangkan untuk unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Adapun unsur pelayanan yang paling rendah yaitu kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, maka Balai KIPM Balikpapan akan menyikapi hal tersebut dengan melakukan koordinasi, komunikasi dengan Tim PIC Pusat BKIPM dan SSMQC. Sehingga kemudahan akses dalam kecepatan respon aplikasi PPK online tidak lagi terjadi gangguan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/ kritik yang masuk melalui pantauan link SKM (terlampir), semua responden tidak memberikan kritik sehingga diperoleh asumsi untuk tetap mempertahankan mutu pelayanan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan di Balai KIPM Balikpapan, maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, oleh karena itu hasil analisa ini digunakan untuk tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Rencana Tindak Lanjut:

- Balai KIPM Balikpapan akan menyikapi hal tersebut dengan melakukan koordinasi, komunikasi dengan Tim PIC Pusat BKIPM dan SSMQC. Sehingga kemudahan akses dalam kecepatan respon aplikasi PPK online tidak lagi terjadi gangguan

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 3 bulan).

Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan	Koordinasi dengan Tim PIC Pusat BKIPM dan SSMQC			√		Tim PIC BKIPM Balikpapan

4.3. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai KIPM Balikpapan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan 4 tahun 2023 sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 pada Balai KIPM Balikpapan.

V. HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Tabel 6. Ringkasan hasil SKM Triwulan I Tahun 2024

No.	Unsur SKM	Nilai Rata2
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.97
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3.97
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	3.97
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	3.95
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.97
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3.97
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	3.97
8	Kualitas isi/konten aplikasi sistem layanan	3.97
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.97
Rata – rata		3.96

Tabel 7. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2024

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Kesesuaian biaya jasa layanan	Melakukan sosialisasi pendampingan secara langsung pada saat kegiatan surveilen di unit pengolah ikan (UPI) atau suplier serta melalui whatsapp group pegawai maupun whatsapp grup pengguna layanan.		√			Inspektur mutu

VI. KESIMPULAN

- a. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Balai KIPM Balikpapan dipersepsikan **Sangat Baik** oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu **99.94** dari 9 unsur pelayanan, dengan nilai mutu **A**. Dengan demikian nilai SKM Balai KIPM Balikpapan menunjukkan konsistensinya dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di triwulan II tahun 2024.

LAMPIRAN

1. Kuesioner

<https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22>

2. Hasil pengolahan data

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0									
2	Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products)										
3	Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	42	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.98	4.00	4.00	4.00
5	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk)	0									
6	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar)	0									
7	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	0									
Rerata			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	4.00	4.00	4.00
Grand Total		43									

No.	Kritik dan Saran
1	Pelayan nya sangat baik dan cepat
2	Pelayan nya sangat baik humanis dan cepat
3	Pelayan sangat baik
4	Pelayan sangat cepat dan baik
5	Pelayanan nya sangat baik
6	Pelayanan nya sangat baik dan cepat
7	Pelayanan saat bagus
8	Pelayanan sangat baik
9	Pelayanan sangat baik cepat
10	Pelayanan sangat baik dan cepat
11	Pelayanan sangat baik dan cepat , sangat baik
12	Pelayanan sangat baik dan cepat dan humanis
13	Pelayanan sangat cepat
14	Pelayanan sangat cepat dan baik
15	Pelayanan sangat memuaskan
16	Pelayanan sangat oke
17	Sangat baik dan cepat
18	Sangat membantu dalam dokumen
19	Sangat memuaskan pelayanan nya
20	Sangat puas pelayanan nya
21	Tingkatkan terus layanan Untuk kemudahan kerjasama yg
22	maju



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN**

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115
TELEPON (0542) 7581284
LAMAM www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkipmbalikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
NOMOR : B. 4b /BKIPM.BPN/KP.440/III/2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT/PELANGGAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BALAI KIPM BALIKPAPAN
TAHUN 2024**

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BALIKPAPAN**

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Balikpapan kepada masyarakat dalam hal pelanggan/pengguna jasa KIPM, perlu dilakukan penilaian atas pendapat pelanggan/pengguna jasa terhadap pelayanan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi/pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa untuk melakukan survei tersebut perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan tugas tersebut yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMBERI TUGAS

Menetapkan: Surat Tugas Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tentang Penunjukkan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024

PERTAMA : Menunjuk pegawai Balai KIPM Balikpapan yang namanya tercantum dibawah ini sebagai tim Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dengan susunan:

Pembina/Pengarah	:	Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
Ketua	:	Drh. Frederica Ethis M
Sekretaris	:	Novita, S.St.Pi
Anggota	:	Winda Anggraini, S.St.Pi Heri Supriadi Frederik Sanda Rachmad Hidayat, S.Si Zainal, S.Pi

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada Balai KIPM Balikpapan sebagai berikut:

1. Pembina/Pengarah : Memberikan arahan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik
2. Ketua :
 - Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan sistem yang ada
 - Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
3. Sekretaris :
 - Mengumpulkan dan mengarsipkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 - Melakukan kompilasi dan pengolahan data operasional dalam rangka penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat
 - Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat
4. Anggota :
 - Membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat

- Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh pengarah kegiatan maupun ketua

- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai KIPM Balikpapan Tahun Anggaran 2024, Nomor: SP DIPA-032 13.2.567610/2024 Tanggal 24 Nopember 2023
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2024
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai KIPM Balikpapan
- KEENAM** : Surat Tugas ini berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Lembar Pengesahan	
Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 5 Maret 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan,




Eko Sulystianto

INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN
PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK. 7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	81	87,94

Uraian Capaian IKK

Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan II Tahun 2024 memperoleh nilai 87,94 dengan kategori Tinggi

Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulistyanto, S.Pi,



INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan

Triwulan : Triwulan II / 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI KIPM BALIKPAPAN	18	20.72	82.88 %	32.78	81.95 %	29.44	98.13 %	5	100 %	87.94	TINGGI

**PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK
PERBAIKAN KINERJA LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN
PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	80	100

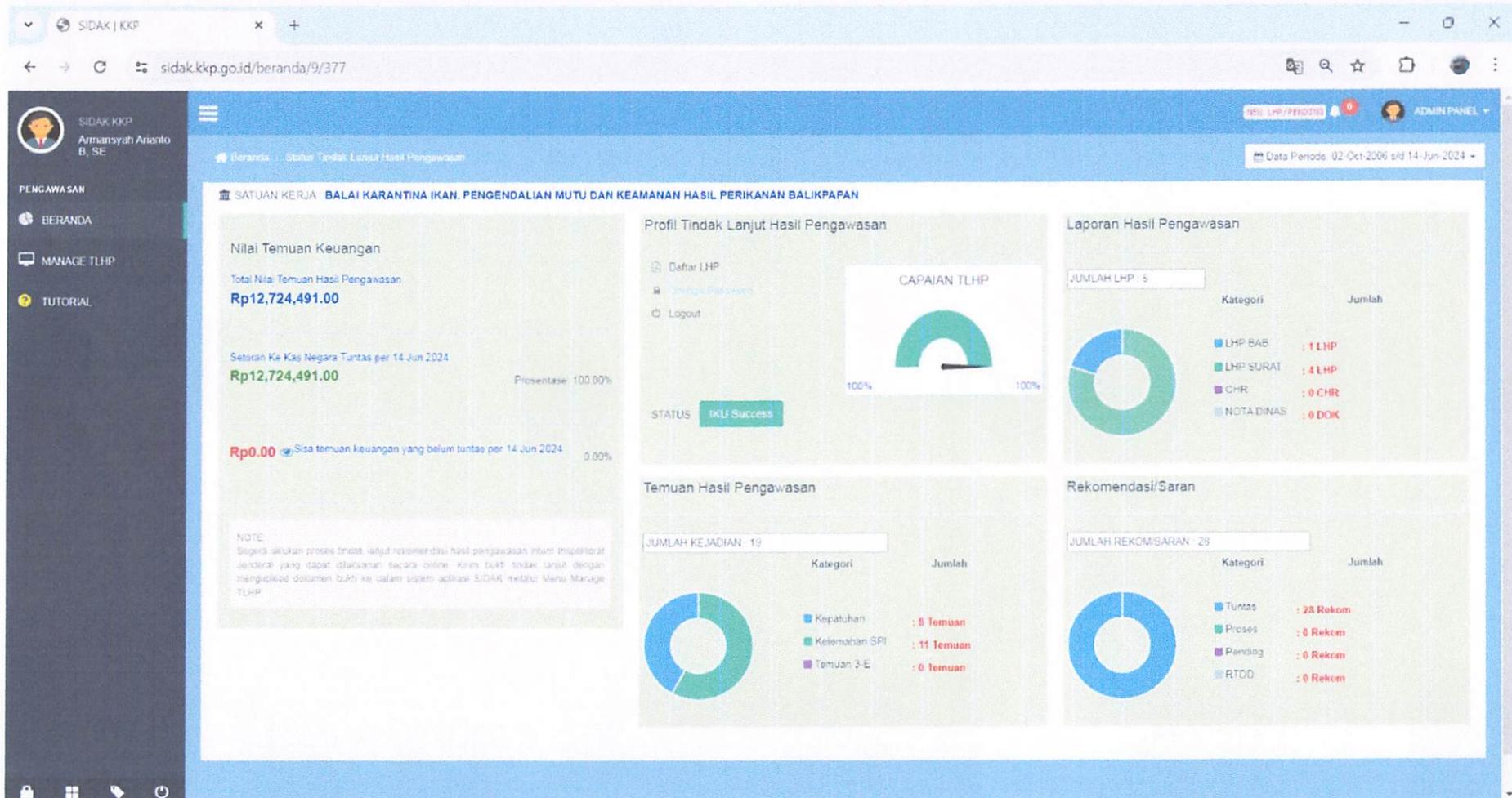
Uraian Capaian IKK	
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan Triwulan II tahun 2024, terealisasi 100 % berdasarkan data Aplikasi SIDAK karena tindak lanjut hasil temuan sudah tuntas / terselesaikan.	
$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100 \%$	
$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I
$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

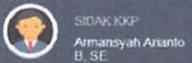
Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto, S.Pi,

TANGKAP LAYAR APLIKASI SIDAK BKIPM BALIKPAPAN TRIWULAN II TAHUN 2024





- 🏠 BERANDA
- 📄 MANAGE TLHP
- 📖 TUTORIAL

Jumlah Laporan : 5 Dokumen
Jumlah Temuan : 16 Temuan
Jumlah Rekomendasi : 25
Nilai Keuangan : Rp12.724.491

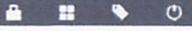
Tuntas : 23 Rekomendasi
Proses : 0 Rekomendasi
Pending : 0 Rekomendasi
Sisa Nilai Keuangan : Rp0

Search

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
587810	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKAPAPAN	Evaluasi	1.09.14/ITJ.4HP/4101/1/2020	2020-09-14	Evaluasi Penerapan Negara Bukan Paper (NBP) di Balai KIPM Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	TUNTAS	🔍 Detail
587810	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKAPAPAN	Audit	4075/ITJHR/110/1/2021	2021-03-31	LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA BKPM BALKAPAPAN TA 2020-2021	TUNTAS	🔍 Detail
587810	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKAPAPAN	Evaluasi	R.75/ITJHP/4401/1/2022	2022-04-05	Hasil Evaluasi etas Implementasi DAQP pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Balikpapan Tahun 2022	TUNTAS	🔍 Detail
587810	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKAPAPAN	Evaluasi	T.183/ITJ.4HP/4201/1/2023	2023-05-10	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kalimantan Timur	TUNTAS	🔍 Detail
587810	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKAPAPAN	Evaluasi	T.178/ITJ.4HP/4201/1/2023	2023-06-07	Hasil Evaluasi NBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Balikpapan	TUNTAS	🔍 Detail

Showing 1 to 5 of 5 entries

🔍 Previous 🔍 Next



**NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

UNIT KERJA : BALAI KIPM BALIKPAPAN
PERIODE / TAHUN : TRIWULAN II / 2024

No	Uraian IKK	Target	Realisasi
IKK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	83	92,67

Uraian Capaian IKK

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan Semester I Tahun 2024 adalah 92,67. Pengukuran dilakukan berdasarkan 13 variabel yaitu : revisi DIPA, deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.



Balikpapan, 01 Juli 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

(Signature)
Eko Sulistyanto, S.Pi, M.Si

TANGKAP LAYAR WEBSITE SPANINT KEMENKEU BKIPM BALIKPAPAN TRIWULAN II TAHUN 2024

spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPSatker/indikatorKinerja

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | JUNI** CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	83.27	93.62	0.00	0.00	100.00	91.68	74.14	80%	0.00	92.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.49	18.72	0.00	0.00	10.00	22.92				
					Nilai Aspek	91.64		96.81			91.68					